KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Terdampak kenaikan BBM,UMKM juga butuh bantuan
Tanggal : Selasa, 27 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

BPUM Rp 1,2 Triliun Belum Bisa Cair

Terdampak Kenaikan BBM, UMKM Juga Butuh Bantuan

Senayan berharap Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) bisa disalurkan tahun ini. Bantuan sosial sebesar Rp 1,2 triliun bagi pelaku usaha mikro ini masih terkendala birokrasi.

ANGGOTA Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) terus memperjuangkan bantuan buat usaha wong cilik. Karena, kenaikan harga BBM membuat kehidupan perekonomian masyarakat makin terjepit.

"Kami ingin bantuan Pemerintah dinaikkan bukan Rp 24 triliun, tetapi Rp 78 triliun. Jadi, bukan hanya dalam tempo 3 bulan tapi 6 bulan, sehingga jangkauannya juga bisa lebih luas," kata Andre di Jakarta, kemarin.

Dengan adanya kenaikan jumlah bantuan sosial ke masyarakat, bisa menyasar para pelaku usaha mikro melalui program BPUM.

Cuma sayang, BPUM ini belum mendapat lampu hijau dari Kemenkeu. Kendati, sudah ada surat dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada 15 September lalu, meminta agar bantuan Rp 1,2 triliun ini bisa ikut dicairkan

"Walau sebenarnya angka Rp 1,2 triliun ini tidak besar tapi akan berdampak besar kepada rakyat kalau program BPUM ini turun. Tidak ada alasan bagi Kemenkeu tidak mendukung program BPUM," jelas politisi Gerindra ini.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi VI Evita Nursanty. Dia mendorong agar ada bantuan langsung dari Pemerintah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Pencairan BPUM ini termasuk suksesnya program program data tunggal Koperasi dan UMKM.

"Targetnya itu ada 14,5 juta data pada 2022 hingga 65 juta data pada 2024," kata Evita.

Mengenai masalah data tunggal, dia mewanti-wanti pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain termasuk Badan Pusat Statistik (BPS). Apalagi data yang dianggarkan untuk program ini cukup besar mencapai Rp 387 miliar.

"Kita berharap data ini dapat menjadi data tunggal dari informasi terhadap UMKM kita yang ada di Indonesia," tambah dia.

Anggota Komisi VI DPR Harris Turino menambahkan, sejatinya Pemerintah telah mengalokasikan Rp 27 triliun untuk bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak kenaikan BBM.

Bantuan ini sudah termasuk di dalamnya bagi pekerja dengan penghasilan Rp 3,5 juta ke bawah. Namun sayang, Rp 27 triliun ini belum menyentuh program BPUM.

Padahal, lanjutnya, sejarah membuktikan bahwa Indonesia bisa selamat dari berbagai krisis ekonomi karena ditopang oleh UMKM.

"Saya mendukung untuk tahun 2022 BPUM ini bisa dilaksanakan," katanya.

Harris menjelaskan, sebenarnya BPUM ini sudah masuk dalam pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM 2022, namun belum bisa dicairkan di Kemenkeu.

Untuk itu, dia memberikan dukungan penuh kepada Menteri Teten memperjuangkan bantuan sebesar Rp 1,2 triliun ini bisa segera cair.

"Pengusaha mikro di daerah ini sangat membutuhkan. Angka Rp 600 ribu memang tidak besar kelihatannya, tapi bagi pelaku usaha mikro akan sangat bermanfaat," jelasnya.

Teten Masduki menegaskan, pihaknya sudah kirim surat ke Menteri Keuangan pada 15 September lalu agar bantuan untuk pelaku usaha mikro ini bisa cair sebelum akhir tahun 2022.

"Kami sedikit melakukan *adjustment* karena tahu anggarannya memang belum tersedia. Ini kami ajukan lagi Rp 1,2 triliun yang akan disalurkan kepada 2 juta pelaku usaha mikro, dengan besaran bantuan untuk setiap pelaku usaha mikro sebesar Rp 600 ribu," katanya.

Dia menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan BPUM ini walau waktunya sudah hampir mepet dan hampir tidak mungkin disalurkan.

Apalagi berbagai regulasi untuk pelaksanaan BPUM ini sudah siap. "Kami sudah siap, tinggal persetujuan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenkeu," tambah dia ■ KAL